

Pembentukan Demokrasi Lokal di Aceh

M. Alkaf

IAIN Langsa, Aceh

alkaf@iainlangsa.ac.id

Shafrida Wati

IAIN Langsa, Aceh

shafridawaty@iainlangsa.ac.id

Abstract

This paper discusses the formation of local democracy in post-conflict Aceh by focusing on the emergence of a new political identity with no vertical relationship with the national political structure. This research uses a qualitative method with a political history approach. Based on empirical data analyzed by documentation from 2017 to 2021, the article argues that the formation of post-conflict local democracy is a consolidation carried out by various political groups and pressures for the stability of Aceh's rehabilitation and reconstruction from disasters. To defend this thesis, the author discusses three themes: the disaster in the Indian Ocean, the search for a dignified form of peace, and local political reintegration. This paper ultimately concludes that the formation of local democracy in post-conflict Aceh has made a significant contribution to building awareness of political identity from smaller units of the well-known Indonesian story.

Keywords: Conflict, Disaster, Local Party, Peace

Abstrak

Tulisan ini membahas pembentukan demokrasi lokal di Aceh pascakonflik dengan berfokus munculnya identitas politik baru yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan struktur politik nasional. Riset ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sejarah politik. Berdasarkan data empiris yang analisis dokumentasi selama tahun 2017 hingga 2021, tulisan berargumen bahwa pembentukan demokrasi lokal pasca konflik merupakan konsolidasi yang dilakukan oleh beragam kelompok politik dan tekanan stabilitas rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dari bencana. Untuk mempertahankan tesis tersebut, penulis membahas tiga tema, yakni bencana di Samudra Hindia, pencarian bentuk perdamaian yang bermartabat, dan reintegrasi politik lokal. Tulisan ini pada akhirnya menyimpulkan bahwa pembentukan demokrasi lokal di Aceh pascakonflik memberi kontribusi signifikan terhadap bangunan kesadaran identitas politik dari unit yang lebih kecil dari cerita besar keindonesiaan.

Kata kunci: Konflik, Bencana, Partai Lokal, Perdamaian

Pendahuluan

Perjanjian damai Helsinki antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka telah menyepakati integrasi politik mantan kombatan melalui jalur demokrasi. Untuk memastikan demokrasi tumbuh dengan baik maka Aceh diberi wewenang untuk dapat mendirikan partai politik lokal (Isra, 2005). Keberadaan partai lokal ini diharapkan menjadi instrument ekspresi politik mantan kombatan (Lubis,

2018). Upaya itu terlihat mulai berhasil ketika mantan kombatant mendirikan Partai Aceh yang mendapatkan dukungan dari masyarakat di setiap momen electoral (Amirulkamar & Ismail, 2019). Kedua ini lalu dimaknai sebagai keberhasilan dari konsolidasi demokrasi lokal Aceh setelah konflik bersenjata.

Sejauh ini, studi tentang demokrasi lokal di Aceh cenderung melihat dua hal. Pertama, dominasi Partai Aceh sebagai varian utama dari keberhasilan agenda reintegrasi politik di Aceh (Nurhasim, 2016). Cara pandang ini tidak hanya menegaskan kekuatan politik lokal lainnya, bahkan ikut membentuk perspektif bahwa keterlibatan mantan kombatant adalah garansinya keberlanjutan perdamaian (Mukti, Warsito, Ahmadi, Cipto, & Putra, 2020). Kedua, studi yang menempatkan event electoral sebagai paradigma utama pembentukan demokrasi lokal di Aceh setelah konflik (Nurlinah, Darwin, & Haryanto, 2018). Hal tersebut mengabaikan bahwa demokrasi, terutama di Indonesia, bukanlah semata-mata dilihat dari indikator keberhasilan event electoral dan akibat yang ditimbulkan setelah itu (Mietzner, 2018).

Tujuan tulisan ini melengkapi kekurangan studi-studi terdahulu yang kurang memperhatikan keragaman dimensi persoalan yang terkait pembentukan demokrasi lokal di Aceh pascakonflik. Secara khusus, tulisan ini menunjukkan bahwa konsolidasi demokrasi lokal di Aceh dibentuk oleh beragam kelompok politik dan tekanan stabilitas rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dari bencana. Untuk mempertahankan tesis tersebut, penulis membahas tiga tema, bencana di Samudera Hindia, pencarian damai Aceh yang bermartabat, dan reintegrasi politik lokal.

Metodologi

Pembentukan demokrasi lokal di Aceh dipilih sebagai subjek pembicaraan tulisan ini atas tiga pertimbangan. Pertama, pembentukan demokrasi lokal di Aceh merupakan topik esensial yang belum banyak diperhatikan dalam studi-studi terdahulu. Kedua, pembentukan demokrasi lokal di Aceh menjelaskan tentang adanya pertalian sebab akibat yang membutuhkan suatu pemahaman mendalam. Selain itu, pembentukan demokrasi lokal muncul atas alasan-alasan yang perlu diungkapkan. Ketiga, adanya pembentukan demokrasi lokal menjadi dasar atas persilangan politik lain yang terjadi. Persilangan ini membutuhkan pemetaan untuk merumuskan tindakan aksi. Ketiga alasan dipilihnya isu pembentukan politik lokal sebagai pokok pembicaraan tulisan diharapkan memberikan pembacaan yang menyeluruh dan insight bagi pemecahan masalah.

Penelitian ini bersifat kualitatif yang bersandar pada data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari studi lapangan untuk mengamati langsung dan dari pemetaan aspek-aspek penelitian. Data yang dibutuhkan berkenaan dari tiga tema, bencana di Samudera Hindia, pencarian damai Aceh yang bermartabat, dan reintegrasi politik lokal. Pengambilan data dari ketiga tema itu dilakukan dengan pengamatan, dan dokumentasi terkait. Proses penelitian berlangsung enam bulan yang dimulai dari desk-review, observasi lapangan. Sebelum penelitian lapangan dilakukan dikumpulkan berbagai bahan sekunder, termasuk berita online untuk memetakan pembentukan demokrasi lokal yang terjadi pada tataran teks.

Hasil dan Diskusi

1. Bencana di Samudera Hindia

Minggu pagi, 26 Desember 2004, pesisir pantai di Selat Malaka dihantam ombak besar, tsunami. Aceh, provinsi paling barat Indonesia, merupakan wilyah paling terdampak dari gelombang tsunami itu. Diawali gempa 9,1 SR yang ikuti ombak besar ke darat, Aceh harus kehilangan 400.000 ribu warga, baik karena meninggal dunia atau hilang tanpa jejak. Tahun-tahun itu, Aceh juga sedang berada dalam masa-masa genting yang disebabkan tidak meredanya perang antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka. Tidak ada tanda-tanda kalau sengketa militer itu akan usai, betapa pun militer dikerahkan secara penuh di awal-awal dicabutnya status Aceh sebagai Daerah Operasi sejak tahun 1998 untuk menumpas GAM. Bahkan, status Aceh, setelah gagal perundingan di Jenewa dan Tokyo, yang ditetapkan sebagai daerah darurat militer dan darurat sipil, tidak juga dapat mengakhiri konflik yang sudah terjadi sejak tahun 1976 itu (Abdaz & Norman, 2015). Tiba-tiba, gelombang tsunami datang seperti menyelesaikan kebuntuan tersebut. Hari-hari di awal bencana itu, wajah Indonesia menjadi murung. Metro TV, stasiun televisi swasta yang dimiliki oleh putra Aceh, Surya Paloh, menjadikan tayangan tsunami sepanjang hari sampai malam. Wawancaranya yang begitu menggugah diputar berulang-ulang. Dia menyeru pemerintah pusat harus membuka kantor langsung di Aceh. Duka yang sedang menggunung itu ditafsirkan oleh budayawan Emha Ainun Najib bahwa tsunami itu merupakan pintu gerbang bagi Aceh agar kembali bisa berkepala tegak setelah sekian lama berada dalam kedukaan. Di mata Emha, tsunami adalah jalan keluar untuk Aceh. Kata-katanya itu menjadi benar. Aceh menjadi wilayah terbuka bagi dunia luar.

Warga dunia tergerak untuk membantu Aceh keluar dari keterpurukan akibat bencana itu, tidak perdu apa pun latar belakang yang ada. Semua turun tangan membantu. Untuk mengenang jasa warga dunia, di Banda Aceh dibangun satu museum besar untuk memperingati bencana itu. Di atap gedung, bendera-bendera negara yang datang ke Aceh dipasang untuk mengingat jasa-jasa mereka. Di alun-alun pusat kota, lapangan Blang Padang, dipasang prasasti *say thanks the world* dengan bahasa dari negara yang telah membantu Aceh keluar dari kehancuran karena tsunami. Artefak itu menjadi mentifak ketika melihat hubungan antara Aceh dengan dunia luar. Keterbukaan Aceh itulah yang memungkinkan terjadinya pembicaraan damai antara kedua pihak yang sedang bertikai itu (Le Billon & Waizenegger, 2007; Widiani, 2006), namun tidak dengan Srilangka, negara yang juga mengalami konflik dan tsunami (Kingsbury, 2007).

Tsunami adalah pendorong dari lahirnya perundingan politik dalam penyelesaian konflik militer di Aceh. Memang, dalam setiap penyelesaian konflik Aceh, mulai dari Darul Islam sampai Gerakan Aceh Merdeka, pembicaraan perdamaian dengan bermartabat selalu menjadi salah satu opsi, di luar operasi militer. Perdamaian itu melahirkan beragam kompensasi. Dalam menangani kasus penyelesaian pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka, Pemerintah Pusat berusaha meredam histeria masa yang menuntut merdeka dengan memberikan kompensasi melalui dua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keistimewaan (UU No. 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh) dan kekhusuan (UU No. 18 tahun 2001 tentang Aceh sebagai Daerah Khusus). Kompensasi itu juga diikuti dengan perundingan demi perundingan. Di masa Gus Dur, Bondan Gunawan, Menteri

Sekretaris Negara, pernah dikirim untuk berjumpa dengan Panglima Perang Gerakan Aceh Merdeka, Abdullah Syafii (Gunawan, 2018). Gus Dur melakukan pendekatan kultural dengan mengirim utusannya yang membawa hewan qurban di hari raya Idul Adha. Berjumpa dengan pemimpin militer tertinggi Aceh Merdeka itu, ikut mengingatkan hal serupa yang dilakukan Kolonel Yasin, Panglima Kodam Iskandar muda, dan A. Hasjmy, Gubernur Aceh, menjumpai Daud Beureuh di pusat komandonya selama pemberontakan Darul Islam untuk mengajaknya menghentikan perlawanan terhadap Pemerintah Pusat (Hasjmy, 1984; Hendrowinoto, 1998).

2. Mencari Bentuk Damai Aceh Bermartabat

Setelah Gus Dur diturunkan oleh politisi di Senayan (Utama, 2019), pembicaraan mengenai menghentikan perang coba terus dibicarakan melalui perundingan-perundingan luar negeri. Salah satunya dengan mencoba mencapai jeda kemanusiaan dengan maksud untuk menghentikan kekerasan yang terus terjadi sehingga memakan banyak korban jiwa. Amdi Hamdani, salah satu anggota Komite Bersama Modalitas Keamanan (KBMK) dari GAM di Aceh, menceritakan proses pembicaraan perdamaian yang berlangsung alot. Mereka bertemu tinggal di hotel Kuala Tripa Banda Aceh. Tim komite itu terdiri dari Sofyan Ibrahim Tiba, Usman Lampoh Awe, Amdi Hamdani, Kamaruzzaman, Nasruddin bin Ahmed dan Amni bin Ahmad Marzuki. Anggota komite yang seharusnya menjadi wakil resmi dari kelompok GAM yang berunding, untuk memantau jeda pertempuran, kemudian disangka dengan kasus makar (Firdaus, 2019).

Hari-hari itu dilalui dengan berat oleh mereka yang menjadi anggota komite. Mereka harus secara rutin melapor ke Kantor Polisi daerah Aceh. Di satu pagi, di kamar hotel yang ditinggali oleh Hamdani dan Kamaruzzaman, keduanya sudah berkemas-kemas. Syukurdi Muhkli, aktivis mahasiswa IAIN Ar Raniry, sering datang mengunjungi Hamdani. Mereka sama-sama berasal dari Aceh Tengah sehingga bisa saling berkenalan dekat. Syukurdi Mukhlis masih mengingat peristiwa yang sudah berlangsung dua dekade lalu (Wawancara, 24 Oktober 2020). Pagi itu, Hamdani mulai berkemas. Dia memakai setelan rapi, termasuk dasi. Syukurdi merasa heran, mengapa temannya itu di pagi hari sudah berpenampilan rapi dengan memakai dasi.

Dia bertanya, “Mau kemana, Bang?”

“Ke Polda,” jawab Hamdani singkat sambil merapikan dasinya.

“Lalu mengapa memakai dasi?”

Mendengar pertanyaan itu, mata Hamdani mendekat. Sambil terus merapikan dasi, dia berujar dengan kalimat yang meyakinkan:

“Sebab yang datang ini adalah negara!”

Anggota komite itu akhirnya ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara, kecuali Hamdani. Dia berhasil meloloskan diri ke Jakarta karena bantuan jejaring aktivis Nadhatul Ulama. Hamdani sebelum bergabung dengan GAM adalah mahasiswa di Universitas Nasional. Dia menjadi mahasiswa di Fakultas Pertanian. Namun, aktivitasnya lebih banyak di dunia jurnalistik dan politik. Saat menjadi mahasiswa, dia pernah menyimak pidato kebudayaan dari Sutan Takdir Alisyahbana, sesuatu pengalaman yang meninggalkan kesan mendalam bagi dirinya. Setelah menyelesaikan studinya, dia memilih menjadi wartawan dan bergabung dengan gerakan aktivisme untuk mengadvokasi isu-isu Aceh yang sedang bergejolak. Lalu, di koran tempatnya bekerja, dia banyak menulis isu-isu kekerasan di Aceh. Pembelaannya melalui karyakarya jurnalistiknya lalu menarik perhatian pimpinan GAM di pengasingan. Secara

khusus dia ditelepon oleh Perdana Menteri GAM, Malek Mahmud, untuk mengucapkan rasa terima kasih atas pembelaanya itu.

Sebagai intelektual, Hamdani tertarik dengan gagasan-gagasan etnonasionalisme yang ditawarkan Hasan Tiro. Baginya, Hasan Tiro bukan sekadar pemimpin pemberontakan terhadap rezim otoriterian Jakarta, melainkan juga seorang pemikir hebat. Pada perjumpaan pertama kalinya dengan Hasan Tiro di Swedia, dalam agenda pembicaraan perdamaian COHA, Hamdani terpesona dengan koleksi bacaan Hasan Tiro. Pilihan Hamdani untuk bergabung dengan GAM dikenangnya dengan rapi dalam ingatannya, “Tidak seperti yang lain, ketika saya bergabung dengan GAM, saya diberi sangu oleh keluarga.” (Wawancara Hamdani, 11 Maret 2021). Perjumpaan Hamdani dengan GAM melanjutkan tradisi perlawanan dari masyarakat Gayo dalam agenda politik yang diusung oleh Aceh. Bermula dari pasukan Van Daelen yang bergerak ke atas dataran tinggi Gayo setelah menaklukkan pertahanan muslimin Aceh di Samalanga dan Bate Iliek, serangan pasukan yang didominasi oleh pasukan Marsose itu menghanguskan satu kampung dan menghabisi seluruh warga di kampung itu kecuali satu anak kecil. Keberhasilan serangan itu diabadikan melalui foto yang menunjukkan perasaan pasukan Marsose yang puas dengan wajah berbinar dan berdiri di atas tumpukan mayat dan anak kecil yang menangis kebingungan (Alfian & Basri, 1990) .

Kisah lebih dekat mengenai pertempuran di sepanjang pantai timur dan dataran tinggi Aceh itu direkam oleh Daoed Joesoef (Hartojo, Silalahi, & Soesastro, 1996), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 1978-1982, yang dengan nada masygul mengatakan kepada A. Hasjmy, “Mengapa orang menyangka saya ini terhadap anti terhadap Islam, padahal kakek saya syahid dalam Perang Aceh.” Daoed Joesoef mengenang cerita dari ayahnya, “Pasukan kakek kami dari Bireun terus terdesa sampai ke dataran tinggi Gayo karena kejaran pasukan Van Daelen. Saat itu ayah saya masih kecil. Dalam serangan itu, banyak dari pejuang Aceh yang syahid, termasuk kakek saya. Ayah yang masih kecil itu, lalu dirawat oleh seorang perempuan Jawa yang selama pertempuran menjadi bagian dari pasukan yang terus terdesak. Lalu, ayah saya dibawa ke Medan dan tumbuh besar di kota itu,” (Joesoef, 2006). Begitu pun ketika Darul Islam meletus, ulama golongan ulama muda dari dataran tinggi Gayo, Ilyas Leube mengikuti Daud Beureuh untuk memberontak. Bahkan, resimen Lut Tawar menjadi pasukan terakhir yang menemani Daud Beureuh di tempat persembunyiannya, yang disebut di Mardhatillah, ketika gerakan pemberontakan itu semakin terdesak.

Upaya untuk menyelesaikan konflik Aceh oleh kelompok Hamdani dan kawan-kawannya akhirnya gagal berunding. Upaya dialog di Tokyo berlangsung untuk melanjutkan CoHA akhirnya gagal menemukan titik temu antara kedua belah pihak. Kegagalan itu membuat pemerintah pusat memutuskan untuk menjadikan Aceh sebagai wilayah darurat militer (Gade, 2019; Kumparan, 2021). Kebijakan itu mendapat protes keras oleh Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa se Aceh: BEM USK, BEM UIN Ar Raniry, BEM Unaya, BEM Unmuha, dan BEM Unida. Syukurdi Mukhlis, saat itu bertindak sebagai Koordinator Lapangan (Korlap), mewakili suara mahasiswa yang menolak pemberlakuan status darurat militer untuk Aceh:

“Ada empat poin yang kami serukan saat itu. Pertama, menolak penetapan status aceh sebagai daerah Darurat militer. Kedua, Menolak segala bentuk tindak kekerasan di Aceh, baik oleh TNI/Polri maupun GAM karena hanya menambah penderitaan

rakyat Aceh. Ketiga, penyelesaian konflik Aceh harus dengan jalan perdamaian bukan dengan pendekatan operasi militer. Keempat, libatkan warga sipil Aceh dalam menentukan nasib Aceh dalam bingkai perdamaian.” (Wawancara Syukurdi Mukhlis, 15 Maret 2021).

Isu libatkan masyarakat sipil begitu mengemuka dalam setiap proses pembicaraan damai di Aceh periode 2001-2004, terutama menjelang Pemilu tahun 2004. Namun, di saat yang sama muncul suara-suara penolakan diadakannya pemilu di Aceh dikarenakan provinsi ini masih dalam status darurat militer. Untuk menjaring pandangan masyarakat secara luas, Susilo Bambang Yudhoyono (Menkopolhukam 2002-2004), yang saat itu juga sudah mendirikan Partai Demokrat dan sudah menjadi wacana publik untuk mencalonkan Presiden di Pilpres 2004, mengadakan pertemuan di Banda Aceh. Syukurdi hadir pada acara tersebut sebagai perwakilan mahasiswa. Baginya, Pemilu tetap harus diadakan. Dia masih mengingat dengan rapi apa yang disampaikan itu:

“Pemilu di Aceh tahun 1999 berjalan tidak normal sehingga lahir anggota dewan yang tidak normal pula. Saya menganggap mereka bukan hasil pilihan seluruh rakyat Aceh. Namun, yang harus dicatat, ada atau tidaknya penyelenggaraan pemilu; ada aksi boikot Pemilu; atau, ada gerakan yang melarang masyarakat untuk mengikuti Pemilu, tetap saja akan ada anggota legislatif di Aceh yang terpilih. Justru karena implikasi demikian, kita harus pastikan pemilu tahun 2004 berjalan dengan baik di Aceh. Dengan partisipasi masyarakat untuk mengikuti Pemilu yang meningkat dapat menunjukkan kalau Aceh berada dalam kondisi yang baik-baik saja. Bahkan wakil rakyat yang terpilih akan dianggap normal karena dari hasil Pemilu yang normal pula. Jika kalangan LSM khawatir bahwa Pemilu di Aceh tidak demokratis karena berada di bawah kondisi darurat, kita persilahkan saja mereka untuk memantau, sedangkan masalah keamanan pemantau adalah tugas dari apparat. Saya juga menyampaikan kepada SBY kalau dia mendapat informasi dari Kabupaten Aceh selatan, bahwa bagi mereka yang memiliki KTA Partai Demokrat aman saat mendapat sweeping oleh apparat. Bagi saya, hal itu tidak baik.”(Wawancara Syukurdi Mukhlis, 14 Maret 2021)

Tidak seperti Pemilu 1999 yang berlangsung dalam suasana yang mencekam, Pemilu 2004, baik pada pemilihan anggota legislatif maupun Presiden secara langsung, berlangsung dengan sukses. Di Aceh, Golkar yang sebelumnya dikalahkan PPP pada Pemilu sebelumnya, kembali menjadi pemuncak. Sedangkan untuk hasil pemilihan Presiden, SBY mengalahkan Megawati di Aceh pada pemilihan putaran kedua. Kekalahan Megawati ini menjelaskan bentuk protes orang Aceh atas kebijakan politiknya dengan menerapkan status Aceh sebagai daerah Darurat Militer. Kemenangan SBY yang berpasangan dengan Jusuf Kala digambarkan akan menjadi babak baru dalam penyelesaian konflik Aceh yang sudah berlarut-larut itu. Terlebih, keduanya dikenal sebagai elit politik Jakarta yang moderat dalam memandang relasi Pusat-Daerah di Indonesia.

SBY seorang militer yang berjasa melakukan reformasi TNI. Posisinya sebagai Kasospol ABRI/TNI membuatnya leluasa untuk mencari formula bagaimana tentara dikembalikan pada fungsi pertahanan, setelah sepanjang rezim Orde Baru terlibat dalam politik karena adanya doktrin dwi fungsi ABRI (Azca & Cahyono, 2017; Mietzner, 2006). Sedangkan Jusuf Kala memiliki reputasi yang baik karena berhasil menyelesaikan konflik agama di Maluku. Komposisi baru ini membuat opsi berdamai

dibicarakan beberapa bulan sebelum gempa dan tsunami di Aceh pada tanggal 26 Desember 2004. Tsunami memang bukan penyebab utama adanya pembicaraan mengenai perdamaian, melainkan variabel yang mempercepat adanya perundingan untuk menyelesaikan konflik bersenjata itu. Saat itu, pembicaraan mengenai damai sedang dilakukan oleh rezim baru dengan pihak Gerakan Aceh Merdeka, bencana tsunami datang menghantam pesisir Aceh. Daerah yang paling terdampak adalah wilayah timur dan selatan Aceh. Korban jiwa berjatuhan diprediksi menyentuh angka 400.000 jiwa, baik meninggal dunia dan hilang. Korban jiwa yang mencapai angka sangat tinggi itu ditenggarai karena ketidaktahuan wacana mengenai kebencanaan, terutama gempa dan tsunami. Desakan untuk menghentikan perang itu bersamaan fase tanggap darurat tsunami Aceh.

3. Reintegrasi Politik Lokal

Tsunami besar itu kemudian menggerakkan solidaritas dunia. Kehancuran infrastruktur dan mayat yang bergelimpangan harus segera diperbaiki dengan program tanggap darurat. Salah satu yang menjadi polemik awalnya adalah ketika keterlibatan tentara asing untuk membantu secara cepat proses kehancuran itu (DetikNews, 2005). Muncul pro dan kontra atas keterlibatan militer asing dalam mengatasi fase darurat tersebut (bbcindonesia.com, 2005; Pratomo, 2014). Di saat yang sama, Pemerintah Pusat bertindak cepat untuk mengatasi kondisi genting itu. Presiden dan Wakil Presiden yang baru saja terpilih dalam Pilpres secara langsung pertama dalam sejarah pemilu Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla, mengunjungi Aceh secepatnya. Untuk mengembalikan Aceh ke keadaan semula, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias (BRR) dibentuk yang diketuai oleh mantan Menteri di era Suharto dan Habibie, Kuntoro Mangkusubroto (koran,tempo.co, 2006). Keberadaan BRR ini untuk mengatur bantuan internasional yang masuk ke Aceh. Kemudian, BRR ikut menjadi faktor penting dalam melakukan reintegrasi politik bagi para mantan kombatant Gerakan Aceh Merdeka, yaitu dengan terlibatnya mereka dalam struktur organisasi itu, seperti Teuku Kamaruzzaman – tokoh penting GAM dalam CoHa dan JSC – yang menjabat sebagai Deputi Pengawasan, lalu menjadi Sekjend BRR (Wawancara Syukurdi Mukhlis, 15 Maret 2021).

Kemudian, proses reintegrasi politik berlanjut dengan bebasnya para tahanan politik Aceh dan diberikan ruang kepada kelompok kombatant untuk berpartisipasi dalam demokrasi. Walau demikian, klausul pembebasan tahanan politik dari aktivis Gerakan Aceh Merdeka tidak sepenuhnya berjalan dengan lancar sehingga masih perlu didesak oleh kekuatan-kekuatan politik lokal di Aceh (DetikNews, 2007; koran,tempo.co, 2007). Lalu, untuk melakukan konsolidasi politik, mantan kombatant membentuk Komite Peralihan Aceh (KPA). KPA merupakan transformasi militer menjadi kekuatan sipil dari GAM (Stange & Patock, 2010). Konsolidasi politik pertama dari mantan aktivis GAM adalah menyambut Pilkada pertama di Aceh pasca perdamaian. Karena tidak memiliki kendaraan politik, Aceh diberikan wewenang untuk membuka ruang bagi Calon Perseorangan – melalui UU No. 11 Tahun 2006 – sehingga membuat mantan aktivis GAM dapat berpartisipasi. Untuk itu, diadakan pertemuan seluruh aktivis GAM yang disebut *Duek Pakat Bansa Atjeh Ban Sigom Donja*.

Pada pertemuan itu, dalam analisis Ishaq (2006), elite GAM yang mencalonkan Hasbi Abdullah dikalahkan oleh aspirasi kombatant di lapangan yang condong kepada Nasruddin bin Ahmed. Kekalahan itu membuat elite GAM melakukan manuver yang

membuat Naruddin bin Ahmed mengundurkan diri sehingga GAM tidak mencalonkan diri untuk berpartisipasi, sampai kemudian Hasbi dilamar oleh PPP sebagai wakilnya Humam Hamid. Hal demikian membuat aktivis GAM di lapangan melakukan perlawanan dengan mendukung pasangan Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar. SIRA, yang awalnya merupakan lembaga presidium gerakan sipil dalam kampanye referendum Aceh, semakin dekat dengan GAM ketika akumulasi konflik semakin meninggi (Alkaf, 2012). Kedekatan itu juga yang membuat aktivis SIRA didakwa oleh negara dengan peraturan yang sama untuk menjerat GAM yang berbuat makar sehingga aktivisnya didakwa sebagai tahanan politik.

Formasi ini disebut pasangan GAM-SIRA yang kemudian diduplikasi di berbagai wilayah tingkat dua dalam pilkada. Formasi ini hampir menyapu seluruh perolehan suara di pilkada di berbagai yang kemudian membuat elite politik tradisional tersingkir. Salah satu elit politik tradisional yang paling mendapat sorotan karena tersingkir adalah Tarmizi Karim di Pilkada Bupati Aceh Utara. Politisi ini berasal dari lingkaran politik tradisional yang berakar dari elite PUSA karena dia menjadi bagian dari keluarga besar Zaini Bakri dan Saadudin Djamal. Zaini Bakri merupakan tokoh penting Pemuda PUSA di masa-masa revolusi, pernah menjadi pengikut Daud Beureuh dalam pemberontakan Darul Islam, dan menjadi Bupati Aceh Besar. Sedangkan Saadudin Djamal adalah elite PPP di Aceh. Pada Pilkada 2006, dengan dukungan dari para ulama sepuh, dia dikalahkan oleh Ilyas Pase, mantan kombatan di wilayah itu dalam masa konflik. Kekalahan Tarmizi, yang didukung oleh ulama Aceh, merupakan bentuk lain dari krisisnya wibawa para Teungku di Aceh (Nirzalin, 2011, 2012). Berpalingnya pilihan masyarakat, terutama dari pedesaan, kepada calon-calon dari mantan kombatan tidak mengejutkan karena struktur politik yang mereka gunakan masih menggunakan struktur organisasi di masa konflik.

Mekanisme calon independen itu membuka ruang politik bagi mantan kombatan karena partai lokal belum bisa dibentuk. Selain itu, kemenangan calon perseorangan tersebut merupakan terobosan politik karena telah mengembalikan memberikan kedaulatan penuh kepada rakyat untuk memilih pemimpin yang diyakininya itu tanpa harus melalui seleksi dari partai politik. Setelah calon independen dari unsur mantan GAM menjabat tantangan berikutnya adalah memastikan agenda lainnya seperti yang termaktub dalam MoU Helsinki terlaksana sehingga mantan kombatan bisa melakukan transformasi politik dan reintegrasi secara penuh (Agusta, 2010). Bentuk reintegrasi itu sudah dimuat dalam MoU Helsinki melalui pembentukan partai lokal (Isra, 2005). Frasa partai lokal terdengar asing karena sejak Orde Baru dan Reformasi, keberadaannya tidak lagi menjadi percakapan politik di Indonesia. Padahal partai lokal memiliki sejarahnya di Indonesia karena pernah menjadi kontestan dalam Pemilu 1955 (Feith, 2006; Leirissa, 2009).

Partai lokal pertama kali dideklarasikan adalah Partai Rakyat Aceh. Partai ini didirikan oleh perkumpulan aktivis mahasiswa '98 Aceh yang juga terlibat secara politik selama masa konflik (DetikNews, 2008). Saat itu, GAM sebagai penanda tanganan MoU Helsinki belum membentuk partai lokal. Kemudian, pada tahapan pembentukan partai lokal, muncul ketegangan dengan Pemerintah Pusat ketika mantan kombatan itu berkeinginan untuk membentuk Partai GAM yang dianggap tidak mewakili spirit perdamaian Helsinki (Tempo.co, 2007). Pemerintah Pusat yang sangat sentralistik dalam soal identitas apalagi yang berhubungan dengan separatisme menolak usulan itu. Sikap sentralistik itu semakin ditunjukkan dengan membuat peraturan yang

melarang bendera dan lambang daerah seperti mirip lambang dan bendera organisasi separatis melalui *PP No 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah*.

Kebijakan itu menjadi masalah yang berlarut-larut di kemudian hari antara mantan kombatan yang menguasai perpolitikan Aceh dengan Pemerintah Pusat. Kemudian, mantan kombatan GAM memilih nama yang sangat ikonik, Partai Aceh. Mereka tidak lagi memaksakan kehendak untuk menjadikan nama organisasi GAM sebagai nama partai. Lalu, untuk membuat ingatan masyarakat tidak terputus dengan romantisme masa konflik dahulu, bendera partai pun itu dikreasikan identik dengan bendera organisasi Gerakan Aceh Merdeka. Politik dengan menyasar sentimen masyarakat Aceh terhadap gagasan lama dari GAM yang diterjemahkan melalui Partai Aceh berjalan efektif. Partai lokal ini menjadi sangat dominan di atas panggung politik Aceh selama hampir dua dekade ini.

Keberadaan Partai lokal di Aceh disambut dengan meriah oleh elite politik dan masyarakat. Menjamurnya partai lokal di masa-masa awal perdamaian mengisyaratkan dua hal: Pertama, tumbuhnya struktur politik baru yang mencoba menyingkirkan kekuasaan tradisional dari partai politik nasional yang sudah berakar. Kedua, adanya keyakinan kalau partai lokal dianggap sebagai medium yang lebih aspiratif untuk menyuarakan kepentingan. Ketiga, partai lokal merupakan daya tawar baru bagi Aceh di hadapan Jakarta setelah GAM berdamai. Kemudian, mulailah dideklarasikan beberapa partai lokal dengan latar belakang ideologi dan program yang berbeda. Partai yang berlatar belakang nasionalisme keacehan mendirikan Partai Aceh; kelompok masyarakat yang berlatar belakang santri islam tradisional mendirikan Partai Gabthat dan PDA; kelompok masyarakat yang berlatar belakang muslim modernis mendirikan PAAS; sedangkan kelompok perkotaan mendirikan partai lokal dengan ideologi yang lebih cair seperti PBA; dan kelompok aktivis sipil dan mahasiswa di masa konflik mendirikan PRA dan Partai SIRA. Varian partai lokal itu menunjukkan struktur politik yang terbangun di Aceh setelah konflik semakin kompleks.

Keberadaan partai lokal itu menjadi indikator apakah reintegrasi sudah benar-benar dilakukan dengan baik atau masih tidak. Salah satunya melalui keterlibatan para mantan kombatan, yang tergabung dalam Partai Aceh, dalam setiap even elektoral untuk melihat sejauh mana mereka sudah terintegrasi dalam sistem politik Indonesia itu. Keberadaan Partai Aceh yang terlibat penuh dalam setiap proses demokratisasi semakin membawa para mantan kombatan menjadi bagian dari postur politik nasional. Pada Pemilu tahun 2009, Partai lokal ini kemudian menjadi sangat dominan karena masih menggunakan patronase politik dari masa konflik, sekaligus juga struktur dan kultur organisasi pergerakan bersenjatanya. Tidak hanya mengalahkan seluruh partai nasional yang sudah lebih dahulu berakar, tetapi juga partai lokal lainnya.

Salah satu partai lokal yang tidak mendapatkan kursi satupun di parlemen adalah Partai SIRA. Bahkan partai itu berkonflik dengan Partai Aceh, padahal sebelumnya di masa konflik dan Pilkada tahun 2006, kedua kelompok ini merupakan satu aliansi (Zainal, 2013). Partai lokal yang mampu sedikit unjuk kekuatan adalah PDA. Partai ini didirikan dari basis pesantren/dayah di Seulimeum, Aceh Besar. Pesantren ini didirikan oleh anak seorang ulama yang terkenal, Tgk Abdul Wahab Seulimeum. Partai ini dipimpin oleh anaknya, Tgk. Muhibusabri. Muhibusabri ini awalnya merupakan anggota PPP. Dia pernah menjadi anggota PPP DPRK Aceh Besar.

Sebagai anak dari ulama besar di Aceh, posisi kultural tinggi dan modal sosialnya besar. Dengan modal itulah dia membangun PDA. Namun, sebagai sebuah partai lokal, PDA gagal menjadi partai perwakilan golongan santri dan ulama yang berbasis Islam tradisional. Setiap pemilu, partai ini harus mengganti nama karena kursi yang diperoleh di parlemen selalu saja di bawah angka minimal *parlemen threshold*.

KESIMPULAN

Ternyata, pembentukan demokrasi lokal di Aceh setelah konflik berhubungan dengan beberapa hal. Pertama, desakan dari dunia internasional dan masyarakat Aceh yang sedang tertimpa bencana kepada pihak bertikai untuk menghentikan perang besenjata. Desakan ini kemudian mengharuskan kedua pihak untuk duduk dan berbicara mengenai konflik dan perdamaian di masa depan. Lalu, dari situasi bencana tersebut, perdamaian yang menjadi titik sepakat antara pihak yang bertikai menjadi pendorong lahirnya konsolidasi demokrasi di Aceh. kesepakatan ini diambil sebagai jalan bagi kelompok kombatan dalam melakukan integrasi, baik secara politik maupun kultural.

Jalan demokrasi yang dipilih sebagai kesepakatan dalam perdamaian di Helsinki, lalu menjadikan Aceh sebagai sati-satunya provinsi yang boleh mendirikan partai lokal. Bahkan, sebelum menjadi bagian dari electoral nasional, Aceh juga diperbolehkan adanya Calon Perseorangan untuk mengikuti setiap perhelatan Pemilihan Kepala Daerah. Terobosan politik dan hukum itu, yang awalnya dilakukan untuk memberi kesempatan kepada mantan kombatan melakukan integrasi ke dalam masyarakat kemudian membawa hasil yang lain, yaitu tumbuhnya tradisi demokrasi lokal di Aceh setelah konflik. Hal itu ditandai dengan menjamurnya partai lokal yang dibentuk di Aceh untuk mengikuti Pemilu. Keberadaan partai lokal lalu menjadi antisena dari keberadaan partai nasional yang dianggap mewakili kepentingan Jakarta. Oleh karena itu, partai lokal, terutama Partai Aceh, mendapat limpahan kepercayaan dari masyarakat dari beberapa kali Pemilu dan Pilkada.

Studi ini terbatas pada pembentukan awal partai lokal dan beberapa pelaksanaan Pemilu dan Pilkada di awal perdamaian. Perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai diskursus pembentukan demokrasi lokal, terutama untuk melihat sejauh mana entitas politik lokal imun terhadap intervensi politik nasional. Selain itu, perkembangan terakhir dari semakin merosotnya suara partai lokal belum dielaborasi dengan baik dalam artikel ini. Sejalan dengan itu, artikel ini menyarankan untuk menyarankan perlunya penelitian lanjutan dengan memperhatikan keterwakilan informan dari berbagai latar belakang yang dianggap mampu menjelaskan fenomena demokrasi lokal di Aceh. Selain itu, perlu diperhatikan keberagaman wilayah di Aceh guna mengangkap aspirasi mengenai demokrasi lokal yang lebih komprehensif. Dengan cara ini, potret yang lebih lengkap dan mendalam tentang demokrasi lokal di Aceh dapat dirangkap dengan lebih komprehensif.

Daftar Pustaka

Abdaz, B., & Norman, I. (2015). *Proses Damai Aceh: Model Resolusi Konflik Indonesia*. Jakarta: Yayasan Transisi.

Agusta, D. (2010). *Proses reintegrasi mantan anggota GAM dalam bidang politik dan sosial ekonomi yang difasilitasi oleh Badan Reintegrasi Damai Aceh (BRA)*. Universitas

Gadjah Mada.

Alfian, I., & Basri, M. H. (1990). *Perang kolonial Belanda di Aceh: The Dutch colonial war in Aceh*. Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh.

Alkaf, M. (2012). *Pasang Surut Gerakan Politik di Aceh (Studi Kasus Power Movement Referendum Aceh 1998-1999)*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Amirulkamar, S., & Ismail, I. (2019). The Domination of the Local Party of Aceh Parliament in Responding the Aspiration of Community. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal) : Humanities and Social Sciences*, 2(2), 150–159. <https://doi.org/10.33258/birci.v2i2.251>

Azca, M. N., & Cahyono, M. F. (2017). *Konflik dan Reformasi-TNI di Era SBY*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian.

bbcindonesia.com. (2005). Indonesia sanggah batasi pasukan asing. Retrieved May 18, 2022, from bbc.co.uk website:
https://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2005/01/printable/050115_usaceh.shtml

DetikNews. (2005). Militer Asing Bantu Korban Aceh. Retrieved May 18, 2022, from detik.com website: <https://news.detik.com/berita/d-266651/militer-asing-bantu-korban-aceh>

DetikNews. (2007). Dua Tahun MoU Helsinki: Bebaskan Tapol Asal Aceh! Retrieved May 20, 2022, from detik.com website:
<https://news.detik.com/berita/d-817660/bebaskan-tapol-asal-aceh>

DetikNews. (2008). Partai Rakyat Aceh (38). Retrieved May 23, 2020, from detik.com website: <https://news.detik.com/parpol/d-1059311/partai-rakyat-aceh-38>

Feith, H. (2006). *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*. Jakarta: Equinox Publishing.

Firdaus. (2019). Aceh dan Narasi Universal. Retrieved May 15, 2020, from sinarpidie.co website: <https://sinarpidie.co/news/bagian-iv-aceh-dan-narasi-universal/index.html>

Gade, F. (2019). SBY: Penguasa Darurat Militer Diberi Keleluasaan. Retrieved May 16, 2022, from acehtrend.com website: <https://www.acehtrend.com/news/sby-dan-kisah-penerapan-darurat-militer-di-aceh/index.html>

Gunawan, B. (2018). *Hari-hari Terakhir Bersama Gus Dur*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Hartojo, K., Silalahi, H. T., & Soesastro, H. (Eds.). (1996). *Nalar dan Naluri : 70 tahun Daoed Joesoef*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies.

Hasjmy, A. (1984). *Semangat Merdeka : 70 Tahun Menempuh Jalan Pergolakan & Perjuangan Kemerdekaan*. Jakarta: Bulan Bintang.

Hendrowinoto, N. K. S. (1998). *M. Jasin : Saya Tidak Pernah Minta Ampun Kepada Soeharto*. Jakarta: Pusata Sinar Harapan.

Ishaq, O. S. (2006). Aceh: Dalam Imajinasi Politik Keindonesiaan. Retrieved May 21, 2022, from tempo.co website: <https://nasional.tempo.co/read/89350/aceh-dalam-imajinasi-politik-keindonesiaan>

Isra, S. (2005). Partai Politik Lokal. Retrieved May 23, 2022, from tempo.co website: <https://nasional.tempo.co/read/64233/partai-politik-lokal>

Joesoef, D. (2006). *Dia dan aku : memoar pencari kebenaran*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Kingsbury, D. (2007). Peace Processes in Aceh and Sri Lanka: A Comparative Assessment. *Security Challenges Peace*, 3(2), 93–112.

koran.tempo.co. (2006). Kuntoro Mangkusubroto, Kepala Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias. Retrieved May 18, 2022, from koran.tempo.co website: <https://koran.tempo.co/read/nasional/90173/kuntoro-mangkusubroto-kepala-badan-rehabilitasi-dan-rekonstruksi-aceh-nias>

koran.tempo.co. (2007). SIRA Mintas Tahana Politik Aceh Dibebaskan. Retrieved May 20, 2022, from koran.tempo.co website: <https://koran.tempo.co/read/nasional/116234/sira-minta-tahanan-politik-aceh-dibebaskan>

Kumparan. (2021). Megawati Teken Keppres Darurat Militer 18 Tahun Silam, Sejarah Kelam Aceh. Retrieved April 9, 2022, from kumparan.com website: <https://kumparan.com/acehkini/megawati-teken-keppres-darurat-militer-18-tahun-silam-sejarah-kelam-aceh-1vm2ZALqfae/full>

Le Billon, P., & Waizenegger, A. (2007). Peace in the wake of disaster? Secessionist conflicts and the 2004 Indian Ocean tsunami. *Transactions of the Institute of British Geographers*, 32(3), 411–427. <https://doi.org/10.1111/j.1475-5661.2007.00257.x>

Leirissa, R. Z. (2009). *PRRI Permesta : strategi membangun Indonesia tanpa komunis*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Lubis, S. (2018). Aceh Party : Elections , Conflict and Political Violence in Aceh. *Proceedings: International Conference on Social Politics*, 1(May), 343–354.

Mietzner, M. (2006). *The Politics of Military Reform in Post-Subarto Indonesia: Elite Conflict, Nationalism, and Institutional Resistance*. Washington.

Mietzner, M. (2018). Fighting illiberalism with illiberalism: Islamist populism and democratic deconsolidation in Indonesia. *Pacific Affairs*, 91(2). <https://doi.org/10.5509/2018912261>

Mukti, T. A., Warsito, T., Ahmadi, S., Cipto, B., & Putra, H. A. (2020). The Future of Peace Between Aceh and Jakarta under Helsinki Agreement 2005. *Humanities & Social Sciences Reviews*, 8(3), 657–664. <https://doi.org/https://doi.org/10.18510/hssr.2020.8370>

Nirzalin. (2011). *Krisis Kewibawaan Politik Teungku di Aceh*. Universitas Gajah Mada.

Nirzalin, N. (2012). Islamic Shari'a Politics and Teungku Dayah'S Political Authority Crisis in Aceh. *Journal of Government and Politics*, 3(2), 211–234. <https://doi.org/10.18196/jgp.2012.0012>

Nurhasim, M. (2016). Dominasi Partai Aceh Pasca MoU Helsinki. *Jurnal Penelitian Politik*, 9(2), 1–15.

Nurlinah, Darwin, R. L., & Haryanto. (2018). After Shari'ah: Islamism and electoral dynamics at local level in Indonesia. *Global Journal Al-Thaqafah*, 8(2).

Pratomo, Y. (2014). Pro kontra operasi bantuan tentara asing di Aceh saat tsunami. Retrieved May 18, 2022, from merdeka.com website: <https://www.merdeka.com/peristiwa/pro-kontra-operasi-bantuan-tentara-asing-di-aceh-saat-tsunami.html>

Stange, G., & Patock, R. (2010). From Rebels to Rulers and Legislators: The Political Transformation of the Free Aceh Movement (GAM) in Indonesia. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 29(1), 95–120. <https://doi.org/10.1177/186810341002900105>

Tempo.co. (2007). Mengancam Negara Kesatuan Pendaftaran Partai GAM Ditolak.

Retrieved May 23, 2022, from tempo.co website:

<https://nasional.tempo.co/read/108749/mengancam-negara-kesatuan-pendaftaran-partai-gam-ditolak>

Utama, V. R. (2019). *Menjerat Gus Dur*. Jakarta: Numedia Digital Indonesia.

Widianti, E. (2006). *The Ulama in Aceh in Time of Conflict, Tsunami and Peace Process: An Ethnographic Approach*. Ohio University.

Zainal, S. (2013). Kerjasama yang Terbelah (Satu Analisis Konflik Antara GAM dan SIRA dalam Perpolitikan di Aceh. *Jurnal Suwa*, XI(1), 27–42.